BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap hak karya cipta bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah dapat melindungi hak-hak yang terdapat dalam pemegang hak cipta termasuk hak karya cipta, yang berarti bahwa hak eksklusif baik hak ekonomi dan hak moral yang ada dalam pencipta sudah dapat dilindungi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt Sus-HKI/2021, antara PT NAGASWARA PUBLISHERINDO dan Gen Halintar, menurut peneliti telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka yang dimana Tergugat wajib mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat. Selain itu Tergugat juga terbukti menggunakan lagu lalu mempublikasikannya kedalam media sosial dan melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengimplementasikan Undang-Undang Hak Cipta kepada masyarakat secara efektif dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan platform digital. Pelanggaran hak cipta dalam

platform digital, terutama terkait hak eksklusif pencipta lagu, telah menjadi peringatan penting bagi perlindungan hukum. Tindakan preventif harus diterapkan oleh pemerintah melalui edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di platform digital.

2. Para peng-cover lagu harus lebih peduli terhadap karya seseorang, tidak bisa sembarangan dalam hal meng-cover hasil karya seseorang dikarenakan apabila para peng-cover lagu tersebut merubah lirik, memodifikasi, sampai menggandakan karya seseorang maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Karena menciptakan suatu karya memerlukan pemikiran, waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit demi terciptanya suatu karya musik tersebut.
3. Untuk perkembangan hukum dalam alternatif sebagai penegak hukum di era teknologi digital pemerintah perlu menyusun Undang-Undang yang relevan mengenai teknologi digital seperti privasi data, keamanan cyber, dan penipuan elektronik. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan dan pedoman fleksibel agar mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi, selain itu pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan alat forensik digital untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum.